

Tanggul Lumpur Terancam Jebol

Tanggul harus dipertinggi karena keadaan semakin kritis dan elevasi tanggul satu meter

Tanggul kolam penampungan lumpur di titik 45 tepatnya di desa Siring, Kecamatan Porong hingga desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo kritis. Volume kolam hampir penuh. Hal ini karena hujan yang terjadi pada Sabtu (3/12) malam memenuhi kolam lumpur yang berbatasan langsung dengan rel kereta api dan jalan raya Porong. Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Khusairi, saat dikonfirmasi Minggu (04/12) mengatakan, sejak hujan pada kemarin petang membuat volume air yang berada di kolam penampungan meningkat. Saat ini elevasi atau jarak isi kolam dengan bibir tanggul hanya satu meter.

BPLS sebenarnya sudah mengantisipasi agar lumpur yang bercampur air itu tidak meluber. Namun upaya BPLS ini dihadang oleh sikap warga korban lumpur yang tidak mengizinkan BPLS meninggikan tanggul. "Oleh karena itu, kami meminta warga untuk tidak menghalangi proses pekerjaan yang dilakukan oleh BPLS mengingat saat ini tanggul penahan lumpur sudah kritis," katanya.

Ditambahkan Khusairi, upaya selain meninggikan tanggul, yang telah dilakukan BPLS adalah mengalirkan air dan lumpur ke kali Porong. Namun upaya ini juga dihadang oleh warga yang berasal dari desa Siring dan Renokenongo. Warga ini adalah warga yang berada di dalam peta terdampak sesuai perpres No 14 tahun 2007 dimana biaya ganti rugi atau jual beli lahannya menjadi tanggung jawab Lapindo.

"Sampai saat ini, kegiatan penanggulangan dan pengaliran yang kami lakukan terpaksa tidak bisa dilakukan karena dilarang oleh warga yang menuntut adanya pembayaran ganti rugi. Kami tidak bisa berbuat banyak apabila lumpur bercampur air nantinya meluber ke rel kereta api dan jalan raya Porong," katanya.

Ia mengemukakan, sejumlah alat berat yang bisa bekerja untuk melakukan penanggulangan lumpur tidak bisa dioperasikan menyusul adanya protes warga. "Warga yang melakukan penghadangan itu merupakan warga yang proses ganti ruginya dilakukan oleh Lapindo, bukan pemerintah. Sehingga, saya meminta kepada warga akan kondisi kolam penampungan yang semakin penuh akibat luapan lumpur Lapindo," katanya.

Ia menjelaskan, kalau penghadangan itu tetap dilakukan, maka proses penanggulangan yang dilakukan oleh BPLS tidak bisa berjalan dengan maksimal. "Kalau hal tersebut dibiarkan, kami tidak bisa menjamin kondisi keselamatan tanggul mengingat alat berat yang digunakan untuk perbaikan tanggul tidak bisa bekerja," katanya.

Dia juga meminta kepada sebagian warga yang menghalangi penanggulangan untuk tidak meneruskan aksinya karena tanggul sudah kritis. Ia menyebut, penguatan dan perbaikan tanggul ini karena tanggul terluar Siring hingga Ketapang, berbatasan langsung dengan akses penting.

Di bawah tanggul, ada jalur rel KA dan juga Jalan Raya Porong yang keberadaannya sangat vital. "Kalau lumpur meluber, siapa yang bertanggungjawab," katanya.

Sementara itu, puluhan warga dari desa Siring dan Renokenongo terus melakukan penghadangan terhadap sejumlah alat berat milik BPLS yang akan melakukan peninggian tanggul dan pengaliran lumpur bercampur air ke kali Porong. Mereka tidak mau BPLS melakukan aktivitasnya sebelum ganti rugi dilunasi. Mereka juga tidak peduli bila aksi mereka itu bakal berakibat jebolnya tanggul.

Haji Sholeh, salah koordinator warga mengatakan bahwa sebelum ganti rugi dilunasi BPLS tidak boleh melakukan penanggulangan di Siring dan Ketapang, karena tanah dan lahannya masih milik warga yang belum dibayar. "Kami minta untuk dilunasi dulu, baru bisa melakukan penanggulangan. Karena belum ada kejelasan sisa ganti rugi terpaksa semua aktivitas BPLS terhadap tanggul akan kita usir," katanya.